

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Gambaran Lokasi penelitian ini akan menjelaskan dan memberikan gambaran umum Provinsi DKI Jakarta serta gambaran umum BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini :

4.1.1 Profil Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km² dan lautan seluas 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta 9,041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per km². Jakarta beriklim tropis, dengan suhu tahunan rata-rata 27°C dengan kelembaban 80-90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedang angin musim timur antara Mei dan Oktober. Curah hujan rata-rata 2.000 mm, curah hujan paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September.

Provinsi DKI Jakarta terletak disebelah Selatan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi; sebelah Selatan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam

perdagangan antar pulau dan hubungan Internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta.

Nama kota JAKARTA dapat kita telusuri mulai abad ke-14. Kota ini pada masa itu masih bernama Sunda Kelapa, yakni sebagai pelabuhan kerajaan Pajajaran. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1527, oleh Fatahillah, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Dalam perjalanannya dari masa ke masa, nama Jayakarta pun mengalami perubahan.

Menurut catatan, pada 4 Maret 1621, Belanda untuk pertama kalinya membentuk pemerintahan kota di tempat ini, yang diberi nama Stad Batavia; Sampai dengan menjelang pemerintahan Jepang, sebelum tanggal 8 Januari 1935 (masa awal dimulainya pemerintahan Jepang), nama Batavia tetap dipertahankan. Pada masa pemerintahan Jepang diubah menjadi Jakarta (Jakarta Toko Betshu Shi) dan setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada September 1945, pemerintah kota Jakarta diberi nama “Pemerintah Nasional Kota Jakarta.” Sejak itu nama Jakarta tidak mengalami perubahan lagi sampai sekarang.

Melengkapi keabsahan keberadaan kota Jakarta, tanggal 22 Juni – tanggal digantinya nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta — melalui Keputusan DPR Kota Sementara No. 6/D/K/1956, ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta.

Kondisi Umum Kota Jakarta:

- Jakarta, dengan luas kota: 661,52 Km², terletak di antara 60 8' Lintang Selatan dan 106 0 48' Bujur Timur.
- Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Banten dan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat. Di sebelah utaranya berbatasan dengan laut Jawa.
- Beberapa bagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut.
- Secara umum beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 28 – 31 C.
- Jumlah penduduk kurang-lebih 11 juta pada siang hari, dan 8 juta pada malam hari, dengan kepadatan rata-rata 16.500 jiwa/Km².

- Panjang jalan kira-kira mencapai 6.400-an meter, dimana baru kurang lebih setengahnya yang dilalui jaringan pipa air minum PDAM.
- Dilintasi oleh 13 kali, besar dan kecil, di antaranya kali Ciliwung, Kali Malang, Kali Cideng, Kali Krukut.
- Terdapat sarana telekomunikasi umum, seperti telepon umum, yang sebagian besar diantaranya tidak berfungsi/rusak.
- Merupakan ibukota negara yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
- Dibagi ke dalam 5 (lima) wilayah kotamadya, 43 kecamatan dan 267 kelurahan

Gambar 4.1.1 Peta Administratif Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Website (2023)

4.1.1.1 Visi Misi Provinsi DKI Jakarta

A. Visi Provinsi DKI Jakarta

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

B. Misi Provinsi DKI Jakarta

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

4.1.2 Profil BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh) Provinsi DKI Jakarta atau yang biasa disebut BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah sebuah lembaga pemerintah non-struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola zakat secara resmi di Provinsi DKI Jakarta. BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sendiri beralamat di Jalan Awaludin II No. 17 RT 02/17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 10230.

4.1.2.1 Visi dan Misi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

A. Visi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

“Menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta”

B. Misi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

1. Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna.
2. Mendorong partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat.
4. Memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi

4.1.2.2 Tugas dan Fungsi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi

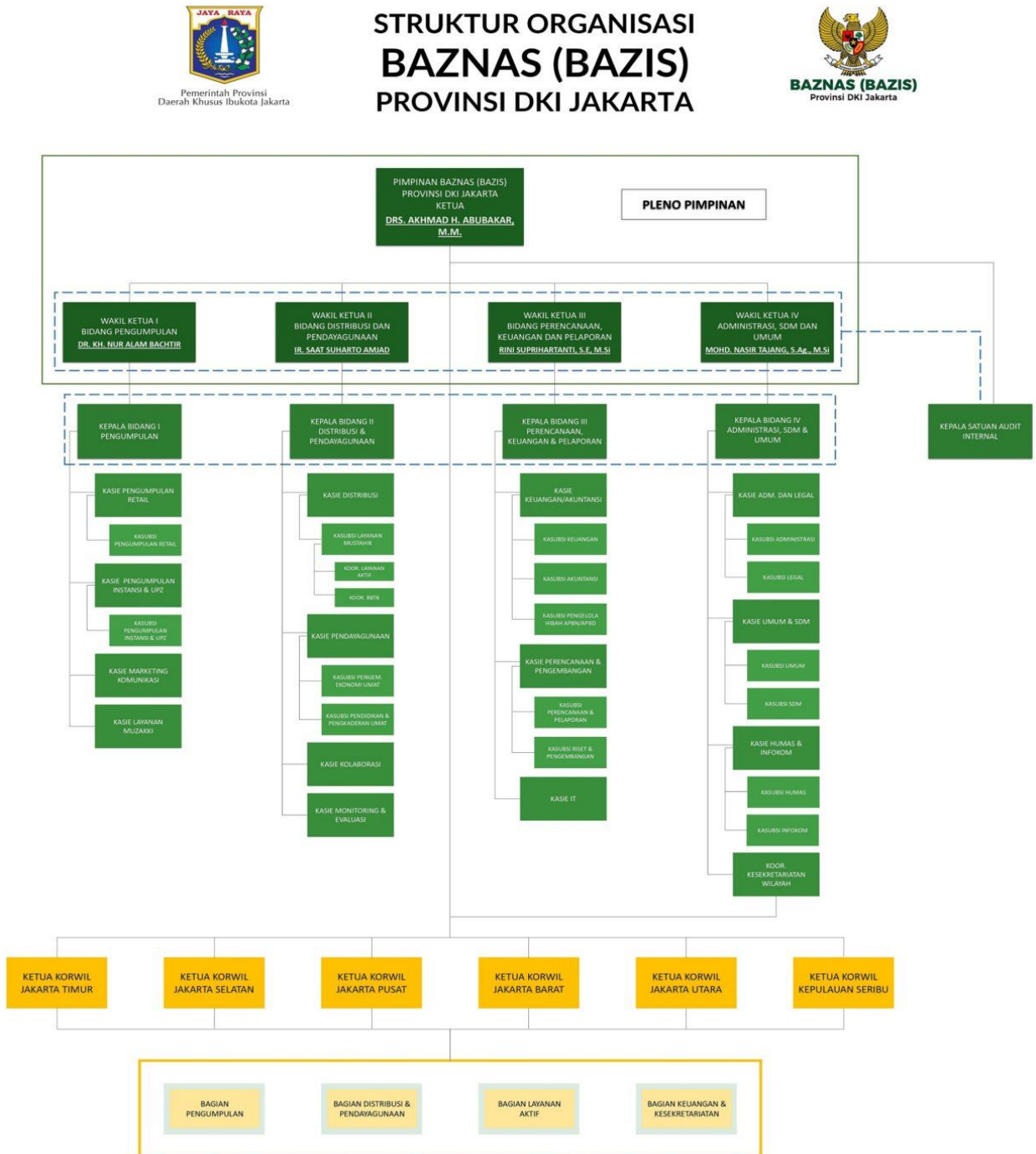
4.1.2.3 Susunan Organisasi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Susunan Organisasi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah :

- a. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta:
 - I. Kepala Bidang I Pengumpulan
 - i. Kasie Pengumpulan Retail
 - Kasubsi Pengumpulan Retail
 - ii. Kasie Pengumpulan Instansi dan UPZ
 - Kasubsi Pengumpulan Instansi dan UPZ
 - iii. Kasie Marketing Komunikasi
 - iv. Kasie Layanan Muzakki
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
 - I. Kepala Bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - i. Kasie Distribusi
 - Kasubsi Layanan Mustahik
 - Koor Layanan Aktif
 - Koor BBTB

- ii. Kasie Pendayagunaan
 - Kasubsi Pengembangan Ekonomi Umat
 - Kasubsi Pendidikan dan Pengkaderan Umat
 - iii. Kasie Kolaborasi
 - iv. Kasie Monitoring dan Evaluasi
- d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
- I. Kepala Bidang II Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - i. Kasie Keuangan/Akuntansi
 - Kasubsi Keuangan
 - Kasubsi Akuntansi
 - Kasubsi Pengelola Hibah APBN/APBD
 - ii. Kasie Perencanaan dan Pengembangan
 - Kasubsi Perencanaan dan Pelaporan
 - Kasubsi Riset dan Pengembangan
 - iii. Kasie IT
- e. Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
- I. Kepala Bidang IV Kesekretariatan
 - i. Kasie Administrasi dan Legal
 - Kasubsi Administrasi
 - Kasubsi Legal
 - ii. Kasie Umum dan SDM
 - Kasubsi Umum
 - Kasubsi SDM
 - iii. Kasie Humas dan Infokom
 - Kasubsi Humas
 - Kasubsi Infokom
 - iv. Koor Kesekretariatan Wilayah

Gambar 4.1.2.3 Struktur Organisasi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Website BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta (2023)

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian mengenai “Implementasi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, dengan menggunakan data yang peneliti dapatkan berupa kata- kata melalui proses wawancara dan observasi terang-terangan. Selain data berupa kata-kata dan tindakan, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi foto guna menguatkan data penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori menurut Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996:9), proses Manajemen Strategis meliputi 4 elemen dasar, yaitu Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*), Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*), dan Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*). Disini penulis mencoba mempresentasikan Implementasi Strategi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menggunakan Teori Manajemen Strategi dari David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen tersebut.

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 sebelumnya, bahwa dalam prosesnya analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman (2009:16), yaitu selama penelitian dilakukan dengan menggunakan 4 tahap penting, diantaranya : pengumpulan data (*data collection*) yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah- masalah yang terjadi di lapangan. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

1. Kode Q untuk menunjukkan kode pertanyaan.
2. Kode Q1, Q2, Q3 dan seterusnya untuk menunjukkan urutan pertanyaan.
3. Kode I untuk menunjukkan informan.
4. Kode I1, I2, I3 dan seterusnya untuk menunjukkan urutan informan.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo (2011:244). Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Kegiatan wawancara dengan informan penelitian, peneliti menggunakan lembar wawancara menggunakan teori Manajemen Strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan Implementasi BAZNAS (BAZIS) dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Model teori Manajemen Strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger memiliki 4 dimensi, yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian. Disini peneliti akan lebih memfokuskan kepada hasil dari Implementasi Strategi BAZNAS (BAZIS) dari teori Manajemen berikut :

4.2.1 Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Ketiga hal tersebut

merupakan modal utama bagi pemerintah dalam mengerjakan program program pembangunan. Salah satu yang menjadi target pemerintah dalam implementasi program adalah bagaimana program tersebut dapat mengatasi masalah publik serta dapat mencapai sasarannya.

Secara manajemen strategi, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dapat ditentukan oleh tiga faktor utama, (Thomas L Wheelen dan David J. Hunger, 1996:13) yaitu :

4.2.1.1 Program

Dalam menunjang berjalannya program maka dibutuhkan sumber daya, saat ini sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta telah memadai dalam mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan, namun masih tetap dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dalam menangani permasalahan tersebut.

“...Ya kalau dulu memang belum, karena saat awal jumlah SDM nya masih kurang, tapi kalau sekarang relatif mencukupi. Akan tetapi dulu pun kita melakukannya berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, tidak sendirian...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

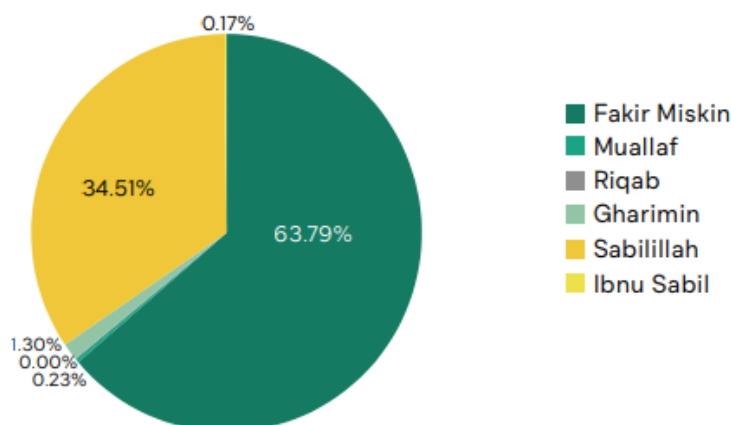
Hasil observasi yang dilakukan juga mendapati bahwa fasilitas dan pegawai BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sudah hampir mencukupi untuk menjalankan program yang ada. BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan recruitment relawan program jika membutuhkan sumber daya manusia tambahan.

Pemetaan terhadap penerima zakat sudah dilakukan dengan melihat data yang ada, sehingga dapat memprioritaskan bantuan-bantuan yang digulirkan kepada masyarakat dari program yang terlaksana.

“...Punya (data). Berangkat dari situ kita bisa memetakan sesuai prioritas (ada fakir, miskin, dll)...” (Wawancara dengan I1, pada 8 Mei 2023)

Data observasi yang didapat menunjukkan hasil seperti gambar berikut :

Gambar 4.2.1.1 Persentase penyaluran asnaf

PENYALURAN ASNAF 2021**Tabel Penyaluran Asnaf 2021**

| Asnaf | % | RP | Penerima Manfaat |
|--------------|-------------|------------------------|------------------|
| Fakir Miskin | 63.79% | 93,910,767,113 | 664,126 |
| Muallaf | 0.23% | 339,772,700 | 2,459 |
| Riqab | 0.00% | 0 | 250 |
| Gharimin | 1.30% | 1,914,896,600 | 740 |
| Sabilillah | 34.51% | 50,806,827,054 | 1,634,502 |
| Ibnu Sabil | 0.17% | 251,231,200 | 211 |
| | 100% | 147,223,494,667 | 2,302,288 |

Sumber : Data observasi lembaga (2023)

Kemiskinan di Ibukota Provinsi DKI Jakarta dapat disebut sebagai kemiskinan ekstrem, sehingga harus mendapat perhatian dan penanganan lebih oleh berbagai pihak, bukan hanya oleh pemerintah.

“...DKI sebagai ibu kota kan sebenarnya semuanya ada. Lebih penekannya itu di DKI ini ada yang bahkan disebut sebagai “Kemiskinan Ekstrem”. Kalau di daerah orang semiskin-miskinnya masih bisa makan, berbeda dengan DKI. Itu yang seharusnya jadi perhatian...” (Wawancara dengan I4 di sekitar Kantor BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, 28 Februari 2023)

Sehingga sudah sepantasnya BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk menanggulangi kemiskinan agar jumlah kemiskinan tidak terus bertambah.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta harus mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat termasuk permasalahan yang menyangkut dengan kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan membuat 5 (lima) pilar program.

Ditunjukkan lebih rinci terkait 5 (lima) pilar program BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta yang disebut sebagai 5 Pilar Jak B, yaitu :

1. Jak B Green (bidang lingkungan),
2. Jak B Sehat (bidang kesehatan),
3. Jak B Cerdas (bidang Pendidikan),
4. Jak B Bertaqwa (bidang keagamaan),
5. Jak B Berdaya (bidang ekonomi).

“...Sebenarnya lebih tepat kita punya 5 pilar. Pilar ini merupakan program dalam rangka mencapai visi misi. Terus dibreakdown ke program lalu rencana kerja. Tiap tahun juga dibuat program sesuai 5 pilar program....” (Wawancara dengan I3, pada 8 Mei 2023)

Program BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta semuanya dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, khususnya kemiskinan. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan tersebut, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program yang seluruhnya terfokuskan untuk 8 (delapan) asnaf penerima bantuan zakat, termasuk fakir miskin.

Data persentase penyaluran dana zakat, infak dan shadaqoh berdasarkan 5 (lima) Pilar Jak B adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.1 Persentase penyaluran dana zakat berdasarkan 5 Pilar Jak B

Tabel Penyaluran 5 Pilar JAK B 2021

| Bidang Program | % | RP | Penerima Manfaat |
|----------------|-------------|------------------------|------------------|
| Jak B' berdaya | 35.78% | 52,671,063,769 | 675,602 |
| Jak B' betaqwa | 27.04% | 39,805,107,079 | 1,409,479 |
| Jak B' cerdas | 9.85% | 14,497,835,498 | 20,308 |
| Jak B' hijau | 22.71% | 33,431,573,351 | 10,605 |
| Jak B' sehat | 1.69% | 2,490,076,493 | 6,335 |
| Operasional | 2.94% | 4,327,838,477 | 179,963 |
| | 100% | 147,223,494,667 | 2,302,292 |

*Data penyaluran dana ZIS tidak termasuk ambil

Sumber : Data Observasi Lembaga (2023)

“...Semua program tadi, karena semua program ada sarasannya sendiri. Bagi piring, semua bisa makan, itu sarasannya untuk orang – orang yang memang sudah tidak produktif dan orang yang teporary “bokek” (tidak punya uang). Kalau dari sisi difabel ada kafe difabis dll. Kalau dari sisi MDJ (program bantuan biaya pendidikan) kan memang mereka kita persiapkan 5-10 tahun yang akan datang (sekarang sudah 3 tahun berjalan) nanti akan ada banyak lulusan MDJ yang berperan. Sekarang aja kan kenalannya udah lumayan (antar universitas dan daerah)” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

Adapun Program-program unggulan yang sudah dibuat dan berjalan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi kemiskinan terdapat di Pilar Jak B Berdaya dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 4.2.1.2 Data Implementasi Program Jak B Berdaya 2021

| No | Penyaluran | Penerima Manfaat | RP |
|----|---|------------------|-----------------------|
| I | JAK B' BERDAYA | 675,602 | 52,671,063,769 |
| | A. Pendayagunaan : | 253,827 | 9,106,744,659 |
| | - Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan | 5 | 500,000 |
| | - Zmart | 1,890 | 2,052,000,000 |
| | - Saudagar tangguh | 2,755 | 1,713,266,800 |
| | - Difabis | 1,100 | 95,389,799 |
| | - Ekonomi Umat | 20 | 13,000,000 |
| | - Pelatihan Kewirausahaan | 1,456 | 712,725,700 |
| | - Pendidikan dan Keterampilan Mustahik | - | 1,900,000 |
| | - Kafalah Dhuafa Lansia | 124,630 | 2,478,380,021 |
| | - Insentif Pemberi kerja Difabel | 6 | 9,000,000 |
| | - Pendidikan & Pelatihan Disabilitas | 5 | - |
| | - Peningkatan Kesejahteraan Dhuafa | 121,890 | 1,960,857,400 |
| | - Pelatihan Kebencanaan | 70 | 69,724,939 |
| | B. Pendistribusian | 421,775 | 43,564,319,110 |
| | - Bantuan untuk meringankan beban hidup | 123,480 | 8,666,744,555 |
| | - Kafalah Yatim | - | 3,000,000 |
| | - Santunan Yatim | 15,195 | 2,852,846,029 |
| | - Santunan Dhuafa | 15,010 | 2,990,286,367 |
| | - Santunan Yatim Binaan Pemprov (Pemda) | 5,500 | 550,000,000 |
| | - Santunan Dhuafa Binaan Pemprov (Pemda) | 9,065 | 583,779,900 |
| | - Santunan Petugas Mesjid | 12,090 | 2,276,784,100 |
| | - Santunan Guru Ngaji Rumahan | 13,050 | 2,641,854,444 |
| | - Santunan Guru Honoror Madrasah | 11,300 | 2,180,329,000 |
| | - Santunan Guru TPA/TKA/PAUD | 11,625 | 2,358,010,900 |
| | - Santunan Kematian dan Biaya Penguburan | - | 1,006,500 |
| | - Program Santunan Binaan Pemda | 21,480 | 1,902,031,528 |
| | - Zakat Fitrah (Idul Fitri) | 10,500 | 479,008,900 |
| | - Pemberian Sarana dan Alat Bantu Difabel | 145 | 37,458,700 |
| | - Jak Mendengar (ABD) | 74 | 273,494,100 |
| | - Jak Bergerak (Kursi Roda) | 574 | 844,478,500 |
| | - Jak Mendengar (Kaki Palsu) | 61 | 81,057,900 |
| | - Penyaluran Bantuan Kepada Mustahik | 50 | 40,029,000 |
| | - Bantuan Daging Qurban | 1,715 | 8,004,190,000 |
| | - Bantuan Kebencanaan | 69,585 | 3,469,111,920 |
| | - Bantuan Kemanusiaan | 16,005 | 1,386,411,335 |
| | - Sarana Prasarana Kebencanaan | 84,750 | 1,532,468,232 |
| | - Riqab | 250 | - |
| | - Bantuan Gharimin | 60 | 158,706,000 |
| | - Ibnu Sabil | 211 | 251,231,200 |

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Tujuan dari semua program BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah untuk menanggulangi kemiskinan secara umum yang ada di Ibukota Jakarta.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan program tambahin untuk para difabel, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan bagi para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

“...Untuk tahun ini mungkin kita mau nambah untuk yang difabel. Tahun lalu kan hanya untuk tuna rungu, untuk tahun ini insyaaAllah akan ditambah untuk yang tuna netra...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

Selanjutnya mengenai hal tersebut sayangnya masyarakat belum begitu tahu tentang fungsi dan tugas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di Ibukota Jakarta.

“...Belum begitu tau mas, saya pernah denger nya soal program BAZIS aja...” (Wawancara dengan I4, pada tanggal 28 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan pertanyaan tentang program kepada I4 yaitu :

“...Iya saya pernah liat itu suka ada di lampu merah kayak billboard tentang simpul kebaikan BAZIS tapi memang lebih ke program yang sudah ada taunya...” (Wawancara dengan I4, pada tanggal 28 Februari 2023)

Dengan pendapat berikut dapat disimpulkan bahwa, ada masyarakat yang sudah tau dan ada juga yang belum mengetahui mengenai tugas dan fungsi serta program dari BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta yang khususnya dibuat untuk menanggulangi kemiskinan di Ibukota Jakarta.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan lembaga zakat baru yang berdiri di Ibukota, dalam menjalankan tugasnya BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada visi misi yang dibuat oleh Pimpinan Lembaga.

“...Ya kita kan BAZNAS (DKI) ini baru lahir di tahun 2019. Pimpinan itu membuat program kerja dan visi misi. Karena visi misi ini sebagai

pedoman dalam melaksanakan kegiatan keseharian...” (Wawancara dengan I1, pada 8 Mei 2023)

Visi misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan visi misi yang disusun oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta mendefinisikan tujuan mendasar dan unik, yaitu menjadi Simpul Kolaborasi Kebaikan.

“...Kalau untuk pelaksanaan visi kita insyaaAllah cukup cepat ya karena kita kemudian menjalin dengan visi menjadi simpul kolaborasi kebaikan) pada posisi ini BAZNAS (BAZIS) menjadi inisiator, menjadi sesuatu yang memungkinkan terjadinya kolaborasi- kolaborasi banyak pihak...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

Namun pelaksanaan visi misi memang tidak akan selalu berjalan lancar. Kendala, hambatan dan juga tantangan pasti akan muncul silih berganti. Informan kunci dan informan utama sepakat bahwasanya kendala yang ada terdiri dari kendala internal maupun kendala eksternal.

“...Banyak sih. Kendala macam-macam ya dari sisi SDM, sistem, lingkungan, stakeholder, ASN, pengumpulan, internal, eksternal. Ya semua itu...” (Wawancara dengan I3, pada 8 Mei 2023)

Informan kunci I2 juga menerangkan secara jelas bahwasanya dalam visi dan misi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta seluruhnya adalah untuk penanggulangan kemiskinan termasuk jargon Simpul Kolaborasi Kebaikan, meskipun tidak langsung tertuang kata penanggulangan kemiskinan dalam teks visi dan misi saat ini, tapi jelas lembaga zakat harus identik dengan penanggulangan kemiskinan.

“...Ada, jelas itu. Menjadi lembaga zakat itu identik dengan penanggulangan kemiskinan. Meskipun disana tidak dikatakan menanggulangi kemiskinan tapi menjadi lembaga zakat yang amanah itu artinya lembaga yang menanggulangi kemiskinan. Tugasnya lembaga

zakat menyalurkan zakat untuk ashnaf nah itu salah satu...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

Informan kunci I1 menyatakan ada program jangka Panjang oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“...ada satu yang kita pingin bahwa kampung-kampung kumuh (terutama yang kena bencana) itu bisa kita revitalisasi. Dan kampung-kampung yang dibangun oleh BAZNAS (BAZIS) itu menjadi percontohan untuk penataan kota. Itu salah satu yang nantinya kita harapkan dalam jangka panjang akan terjadi...” (Wawancara dengan I1, pada 8 Mei 2023)

Dia juga menambahkan :

“...Kemudian kita juga menginvestasikan (hampir 20%) untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa miskin (bukan mahasiswa-mahasiswa pintar saja) mereka (mahasiswa pintar) bisa mendapatkan beasiswa di tempat lain. Nah kalau di Jakarta itu diharapkan semua pihak bisa sekolah. Kalau pintar mereka bisa sekolah karena pinternya, kalau masyarakat miskin (meskipun tidak pintar) tapi semangat bisa dapat beasiswa di BAZNAS (BAZIS). Nah kalau dia tidak pintar dan tidak miskin, ya dia dapat beasiswa dari orang tuanya kan. Jadi dengan begitu kita harapkan tidak ada alasan anak jakarta tidak bisa sekolah...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga berperan penting dalam bidang Pendidikan di Ibukota Jakarta.

4.2.1.2 Anggaran

Berkaitan dengan program dan juga pelaksanaannya pasti ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi yaitu untuk menunjang semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, namun dana dari Pemerintah Provinsi hanyalah untuk dana operasional, bukan untuk dana bantuan, karena dana

dari pemerintah provinsi sangatlah kecil. Dengan demikian hal tersebut disampaikan oleh I3 sebagai berikut :

“...dikasih dana hibah 4 M, sementara dana kita 200an M. Jadi dananya bukan dari pemprov, dana pemprov itu hanya sebagai penopang dana operasional. Dananya itu dari para Muzakki dan donatur (pemberi shodaqoh). Jumlah dana pemerintah itu hanya 2% dari total dananya masyarakat...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

Adapun data observasi yang diterima dari bidang keuangan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2.1.2 Hasil pengumpulan dan penyaluran dana zakat

| TARGET 2021 | |
|---------------------|------------------------|
| PENGHIMPUNAN | 138,000,000,000 |
| Zakat | 118,250,000,000 |
| Infak | 19,750,000,000 |
| PENYALURAN | 128,250,000,000 |
| Zakat | 113,800,000,000 |
| Infak | 14,450,000,000 |

Sumber : Observasi data bidang keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. (2023)

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta selalu menyiapkan dana untuk bantuan kepada para mustahik, hanya saja jika memang Lembaga kekurangan dana untuk melaksanakan program besar maka pasti akan menawarkan kolaborasi kepada pihak terkait dimana dalam hal ini yaitu Dinas Sosial sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi.

“...kalau mengajukan dana khusus jatuhnya melalui dinas sosial (misalnya) kalau kita tidak bisa. Tadi, hanya dari dana hibah. Bukan ranah kita...” (Wawancara dengan I1, pada 8 Mei 2023)

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan alokasi anggaran untuk menanggulangi kemiskinan dan juga biaya pendidikan, hal tersebut disampaikan oleh I2 yaitu :

“...Jadi alokasinya 60% memang untuk penanggulangan kemiskinan (dari dana BAZNAS). 20% diantaranya untuk MDJ...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan I3 sebagai berikut :

“...pemerintah kan juga punya program sendiri. Kalau pemerintah pusat punya kementerian yang memang bertugas untuk itu. Kalau diturunkan ke Pemprov dalam hal ini (kemiskinan) ya program pemerintah. Udah punya dinas masing-masing. Kita kan hanya sebagian kecilnya...” (Wawancara dengan I3, pada 8 Mei 2023)

Sehingga BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta tidak dapat meminta anggaran tambahan ke Pemerintah Provinsi, namun mudah untuk berkolaborasi dengan dinas terkait.

Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta pasca pergantian sistem dan juga nama menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Lembaga. Karena hal ini mempengaruhi pengumpulan dana zakat oleh lembaga.

“...Kendala yang awal ya, berubahnya BAZIS ke BAZNAS di awal itu ada semacam ketidakpercayaan. Orang ASN yang dulu membayar zakat melalui BAZIS banyak ASN yang tidak mau bayar zakat lagi ke BAZNAS...” (Wawancara dengan I3, pada 8 Mei 2023)

4.2.1.3 Prosedur

Dalam Implementasi Strategi harus ada sebuah prosedur dan peraturan yang dibuat agar mencapai hasil dan tujuan dari implementasi tersebut. BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta harus membuat sebuah prosedur atau peraturan kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah yang harus diselesaikan. Masalah tersebut khususnya untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Ibukota Jakarta diperlukannya suatu tahapan kegiatan agar bisa terimplementasi dengan baik. Soal tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi kemiskina, dinyatakan oleh I2 sebagai berikut :

“...prinsipnya harus memahami masalah terlebih dahulu dengan melakukan studi (literatur/survei). Setelah itu baru kita membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadi kelompok sasarannya dll nanti ada disitu...” (Wawancara dengan I2, pada 28 Februari 2023)

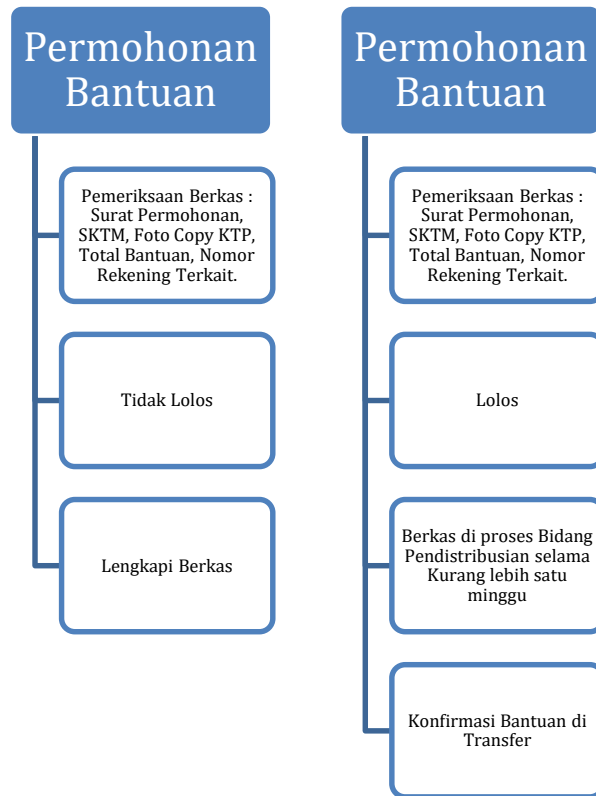
Informan kunci I1 juga menambahkan bahwa :

“...di dalam program itu ada yang secara langsung oleh kita, ada yang permohonan dari masyarakat. Contoh, kita punya program yang namanya tebus ijazah. Nah tebus ijazah ini bisa kita yang pro aktif kerja sama dengan dinas pendidikan, sekolah-sekolah. Akhirnya melalui kita, kita tebuskan (bantu) tinggal sekolah yang membagi ke yang bersangkutan. Tapi bisa juga dari masyarakat yang mengajukan. Kita juga melakukan verifikasi ke lapangan dan meminta rekening sekolah (tidak kepada individu)...” (Wawancara dengan I1, pada 8 Mei 2023)

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatannya diawali dengan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan adanya prosedur kerja tersebut maka seluruh amil dapat melakukan kegiatan operasional pembagian dan zakat dengan terarah dan sesuai target, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembagian dana zakat yang merupakan amanah dari umat.

“...jadi ya dengan pengajuan, melengkapi dokumen, diproses oleh bidang pendistribusian. Pendistribusian telah memenuhi persetujuan. Dan hal-hal kewenangan (verifikasi, validasi, otorisasi), lalu di bagian keuangan setelah disetujui di bidang lain, di kita (bidang keuangan) ada proses lagi. Verifikasi, validasi, otorisasi dan pencairan. Jadi bagiannya saja berbeda...” (Wawancara dengan I3, pada 8 Mei 2023)

Gambar 4.2.1.3 Alur Penyaluran Zakat



Sumber : Hasil Observasi Diolah Peneliti (2023)

Setiap bidang di kantor BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan I3 diatas maka dapat dipahami bahwa prosedur yang dibuat telah disusun sedemikian rupa untuk memenuhi rasa kepuasan muzakki yang berzakat di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Prosedur pengajuan permohonan bantuan juga dirancang se-efisien mungkin agar para mustahik dapat dengan mudah mengajukan permohonan bantuan kepada BAZNAS (BAZIS).

Namun dari hasil observasi yang dilakukan, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai peraturan lembaga yang

disahkan, masih dalam proses pengerjaan. Hal ini akan menjadi hambatan besar dalam melaksanakan prosedur yang ada.

Gambar 4.2.1.3 Proses penyusunan peraturan lembaga



Sumber : Hasil observasi (2022)

Evaluasi biasanya dilakukan setelah program selesai dilaksanakan, informan kunci II menyebutkan sebagai berikut :

“...Evaluasi biasanya setelah program selesai. Contoh pada program Semua Bisa Makan yang bekerja sama dengan warung. Kita evaluasi apakah programnya efektif atau tidak sih. Lalu ternyata ada warung sepi pembeli. Nah kita evaluasi tuh ternyata warung itu berada di kawasan elit, jelas jarang yang beli...” (Wawancara dengan II, pada 8 Mei 2023)

Dilanjutkan dengan memberikan contoh tambahan untuk monitoring yang dilakukan saat bantuan disalurkan :

“...contoh lain memonitor bantuan (contoh : santunan). Di monitor (ditanyakan pada sasaran) sudah diterima atau belum. Jadi monitor itu

berfungsi untuk (melihat) azas manfaatnya ada dimana sih...”
(Wawancara dengan I1, pada 8 Mei 2023)

Dari hasil evaluasi dan monitoring/pengendalian tersebut dapat dilihat apakah program dapat dilanjutkan karena bermanfaat untuk masyarakat atau diberhentikan.

“...jadi bisa jadi program itu tidak dilanjutkan ketika hasil monitoring dan evaluasi (tidak perlu/tidak manfaat). Jadi monitor dan evaluasi itu (untuk kami) sangat penting untuk melihat keberlangsungan program itu...”